

**LEMBAR JAWABAN
ANALISIS KASUS**

Nomor Assessee : 04
Nama Assessee : Ayu Aldiana
Tanggal : 04 Oktober 2021

**MENURUNNYA DISIPLIN KERJA PEGAWAI PEMERINTAHAN DISEBABKAN OLEH
LEMAHNYA PENGAWASAN DAN SANKSI YANG DIBERIKAN KEPADA PELAKU
INDISIPLINER.**

Disiplin pegawai merupakan salah satu elemen terpenting dalam berjalannya suatu pelayanan publik. Apabila pegawai yang memberikan pelayanan publik tersebut memiliki kedisiplinan yang tinggi, maka pelayanan yang diberikan juga akan lebih maksimal hingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat sesuai hakikat Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya. Namun, jika pegawai tersebut tidak disiplin, maka pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga tidak maksimal. Hal ini telah menjadi salah satu patologi birokrasi yang paling dasar. Banyak ditemukan di organisasi perangkat daerah yang khususnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, justru memiliki tingkat kedisiplinan yang rendah, contoh kecilnya adalah tidak datang tepat waktu sehingga membuat masyarakat yang sudah mengantri untuk mendapatkan pelayanan menjadi terhambat. Pegawai yang datang terlambat biasanya menyepelkan hal tersebut karena sistem absensi yang digunakan masih berupa manual, sehingga banyak celah bagi pegawai untuk melakukan tindakan indiscipliner kecil seperti terlambat. Maka dari itu, seharusnya pemerintah meng^{upgrade} sistem absensi untuk memperbaiki tingkat kedisiplinan bagi para pegawai pemerintahan contohnya absensi *online* yang menggunakan GPS sehingga dapat melacak lokasi keberadaan pegawai saat jam masuk kantor (*check-in*) dan jam pulang (*check-out*). Selain meminimalisir tingkat

kecurangan dalam melakukan absensi, hal ini juga dapat mendukung suatu daerah menjadi *smart city* dengan teknologi 4.0.

Selanjutnya, perlu dikaji ulang terkait sanksi-sanksi yang diberikan kepada pelaku indisipliner untuk memberi efek jera sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pengawasan dari atasan langsung sangat dibutuhkan untuk menilai pegawainya. Contohnya, dalam memberikan pelayanan publik penampilan pegawai pemberi pelayanan juga harus diperhatikan. Masih ditemukan pegawai yang tidak disiplin dalam berpakaian saat berhadapan dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik seperti menggunakan seragam tidak sesuai, bagi yang berhijab menggunakan hijab tidak seragam, menggunakan celana jeans, atau bahkan menggunakan sandal jepit. Pegawai *frontdalam suatu OPD pelayanan publik office* merupakan ujung tombak dari pelayanan publik yang diberikan. Seharusnya, pegawai *front office* mendapat perhatian lebih dari atasan, dan diberikan evaluasi setiap bulannya termasuk terkait dengan penampilan mereka saat melayani masyarakat. Saran saya untuk meningkatkan lagi kualitas pelayanan publik dan tingkat kedisiplinan pegawai, atasan langsung dari pegawai *front office* menunjuk pegawai terbaik dan terburuk pada tiap bulannya, sesuai dengan kinerja dan tingkat kedisiplinannya. Hal ini dapat memacu pegawai dan bersaing menjadi pegawai terbaik sehingga pegawai berlomba-lomba meningkatkan kedisiplinan dan kinerja mereka. Sama halnya bagi pegawai yang dinobatkan sebagai pegawai terburuk, ia akan mendapatkan efek jera dan berusaha menjadi pegawai yang lebih baik lagi dengan meningkatkan kedisiplinan dan kinerjanya. Tentunya hal ini dilakukan dengan adanya *reward and punishment* bagi para pegawai tersebut sebagai penghargaan maupun hukuman bagi yang dinobatkan sebagai pegawai terbaik dan terburuk.